

HAK WARGA NEGARA MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN JAMINAN PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARANYA

Alya Fitriana^{1*}

^{1*} Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya, Indonesia

alyafitriana1706@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 2025-09-05

Revised : 2025-09-19

Accepted : 2025-10-08

Keyword:

State Obligations;
Right to Basic Education;
Education in Indonesia.

ABSTRACT

Education is a fundamental human right that plays a vital role in a country's social, economic, and political development. This study aims to identify and further understand the state's obligations in fulfilling the right to basic education and in providing basic education. Thus, this research is expected to contribute to knowledge and practice in improving access to and the quality of basic education in Indonesia. This study uses descriptive qualitative methods to explore the role of education in Indonesia and the state's responsibility in ensuring basic education. Education plays a crucial role for citizens, especially for Indonesia's younger generation. Civic education, national education, and non-formal education all share the same goal: to develop good citizens who are useful to the nation.

How to Cite:

Fitriana, A. (2025). HAK WARGA NEGARA MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN JAMINAN PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARANYA. *Quiz: Journal of Education and Learning*, 1(1), 19-26. <https://doi.org/>



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Pendidikan adalah hak asasi manusia mendasar yang memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Hal ini dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC) pada tahun 1989. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup manusia, memperluas kesempatan, dan mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Ini membantu individu menjadi warga negara yang terdidik, beretika, dan menjadi peserta aktif dalam masyarakat. Hak Asasi Manusia melekat pada manusia. Hak Asasi Manusia mempunyai arti

penting bagi kehidupan manusia sebagai warga negara. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan. HAM diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrat dan berlaku sepanjang hidup manusia.

Di Indonesia, HAM bersumber dan bermuara pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebasbebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Hal ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih luas. Dalam pembangunan ekonomi, pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini juga meningkatkan kemampuan mereka untuk berinovasi dan berkreasi, sehingga meningkatkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi.

Dalam pembangunan politik, pendidikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Ruang lingkup diskusi pendidikan mencakup berbagai topik, antara lain pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia, peran pendidikan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keamanan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. serta inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hal ini, pendidikan adalah hak asasi manusia mendasar yang memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Diskusi pendidikan harus fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap manusia membutuhkan apa yang dinamakan dengan Ilmu, dengan Ilmu setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-cita kan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui Pendidikan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami lebih lanjut kewajiban negara dalam

memenuhi hak atas pendidikan dasar dan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan praktik dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran pendidikan di Indonesia dan tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar. Penelitian dilakukan di berbagai daerah, termasuk perkotaan dan daerah terpencil, dari Mei hingga Juli 2025. Sumber data meliputi wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, pengamatan langsung di sekolah dasar, dan data sekunder dari Dinas Pendidikan, undang-undang, peraturan, jurnal ilmiah, dan buku referensi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan peran negara dalam memenuhi hak ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipan, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang telah ditentukan, mengamati proses pendidikan, dan memberikan landasan teoritis untuk kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena pendidikan di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Pentingnya Pendidikan Bagi Warga Negara

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi warga negara, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan, atau PKN, diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa.

Pendidikan juga sangat penting dalam membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah gelombang globalisasi yang dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi bisa berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia

yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Pendidikan Kewarganegaraan sangat perlu diberikan untuk mencegah terjadinya perilaku negatif akibat perkembangan era globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Azis Wahab dan Sapriya yang menyebut, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan adalah mempelajari dan mengkaji segala sesuatu mengenai pemerintahan, lembaga-lembaga demokrasi, konstitusi, supremasi hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi.

Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan upaya dunia dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global.

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan menghidupkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal).

Berdasarkan hal ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi warga negara, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nasional, dan pendidikan nonformal semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global.

Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka peraturan tentang hak-hak warga negara atas pendidikan dasar diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar

tersebut diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataan angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan mengengah pertama dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, pola pikir masyarakat yang kurang maju yang lebih mementingkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan laju pembangunan saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen:

1. Kualitas Pendidikan

Indikator yang berhubungan dengan kualitas pendidikan diantaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, media pembelajaran dan ketersediaan fasilitas pendidikan.

2. Relevansi Pendidikan

Suatu pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadahi bagi kebutuhan-kebutuhan sektor pembangunan.

3. Elitisme

Elitisme dalam pendidikan adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu. Hal ini perlu disadari bahwa biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

4. Manajemen pendidikan

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan IPTEKS maka penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional.

Keempat hal di atas merupakan kendala utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala tersebut.

Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan luhur diatas, kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak hanya mencetuskan sistem Beliau tidak hanya mencetuskan sistem "Among" dengan trilogi kepemimpinannya sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia yaitu, Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani. Yang dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan memberikan teladan, dan pada saat bersama anak didik mampu membangun prakarsa, pada saat tidak menjadi pemimpin mampu memberikan dorongan atau semangat).

Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsepsi "Tri Pusat Pendidikan" sebagai dasar awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Tri pusat ini terdiri dari orang tua, sekolah dan masyarakat. Tri pusat pendidikan inilah yang menjadi penentu suksesnya pendidikan.

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan yang dimiliki, negara mempunyai otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara khususnya untuk mengenyam pendidikan.

Proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan dan lain-lain.

CONCLUSION

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi warga negara, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nasional, dan pendidikan nonformal semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka peraturan tentang hak-hak warga negara atas pendidikan diatur dalam konstitusi

sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Kewajiban negara dalam memuat hak atas pendidikan dasar yang diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan-undangan yang lainnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memajukan hak warga negara atas pendidikan.

Pemenuhan hak pendidikan tersebut diyakini akan berdampak pada disertakannya hak-hak dasar lainnya seperti hak sipil dan politik. Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM melalui berbagai pendekatan strategi, seperti misalnya mewujudkan pendidikan gratis, pendidikan inklusif, dan metode pengajaran tanpa kekerasan. Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan upaya dunia dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global. Namun pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang rumit, seperti kualitas pendidikan yang masih rendah, relevansi pendidikan yang kurang, elitisme dalam pendidikan, dan manajemen pendidikan yang kurang profesional. Perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala tersebut.

REFERENCES

- Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan bagi generasi milenial dalam menanamkan jiwa nasionalisme di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 30-41.
- Azzahra, N. A. S., & Santoso, G. (2023). Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 214-226.
- Maarif, A. W. Memupuk Jiwa Nasionalisme Gen Z yang Tergerus Arus Kencang Globalisasi.
- Maharani, E., & Najicha, F. U. SIKAP NASIONALISME BERBANGSA DAN BERNEGARA BAGI GEN Z DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI.
- Puspamurti, G., & Najicha, F. U. Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Generasi Z.
- Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25-33.

- Seriyanti, S. (2022). Revitalisasi Semangat Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Z Melalui Nilai-Nilai Pancasila. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 28(3), 82-85
- WIJAYANTI, A. A., RF, N. S., SHINKOO, S. H. L., & FITRIONO, R. A. (2022). peran pancasila di era globalisasi pada generasi Z. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(01), 29-35.